

## Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Flora Evita<sup>1\*</sup>, Dian Fitria Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [floraevita03@gmail.com](mailto:floraevita03@gmail.com)

**Tanggal Masuk:**  
10 Agustus 2023  
**Tanggal Revisi:**  
28 November 2023  
**Tanggal Diterima:**  
25 Desember 2023

**Keywords:** *Accountability; Internal Control System; Performance of Local Government.*

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**  
Evita, F., & Handayani, D.F. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 29-43.

**DOI:**  
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1107>

### **Abstract**

*The objective of this research was to explore the impact of both accountability and internal control systems on the performance of the local government within Pasaman District. The study encompassed a population of 38 OPD in Pasaman District. The study's participants consisted of OPD heads, treasurers, finance heads, and SPI heads. Employing primary data collected through questionnaires, the research involved 152 direct respondents. The findings of the research indicate that: 1) Accountability yields a favorable influence on the performance of the local government in Pasaman District. 2) The internal control system also demonstrates a positive impact on the local government's performance within Pasaman District. The combined contribution of the independent variables in explaining the dependent variable amounts to 8.5%, leaving the remaining 81.5% to be explained by external factors not covered in this research. To enhance future research, it is recommended to introduce additional variables that are relevant to local government performance. Moreover, increasing the respondent pool and expanding the research scope can enhance generalization.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara demokrasi dimana reformasi diperlukan untuk menjadi landasan arah pendidikan didalamnya. Aspek perubahan reformasi yang paling dominan terletak pada aspek pemerintahan. *New Publik Management* (NPM) merupakan salah satu proses reformasi sektor publik di Indonesia. *New Publik Management* (NPM) mempromosikan manajemen yang terinspirasi oleh sektor swasta dan percaya pada nilai tambah dari praktik manajemen dan kontrol seperti bisnis (Ter Bogt *et al.*, 2015). Landasan *New Publik Management* adalah penekanannya pada penetapan standar dan pengukuran kinerja (Hood, 1995). Dalam semangat pembangunan daerah yang bertujuan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada rakyat, terlebih dahulu harus dipahami bahwa pada hakikatnya bersumber dari standar normatif dasar, yaitu Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam mengkaji otonomi, hubungan antara akuntabilitas dan kinerja merupakan salah satu aspek yang diberi perhatian khusus, hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab (Rahakbuw & Firdausy, 2018)

Dalam upaya mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik maka diperlukan akuntabilitas serta fungsi pengendalian internal yang baik pula sehingga akan mendorong kinerja pemerintah daerah memiliki kualitas yang memuaskan (Jitmau, Kalangi, & Lambey, 2022). Tran (2014) dalam penelitiannya yang fokus pada akuntabilitas berbasis kinerja pada pemerintah Cina berpendapat bahwa akuntabilitas tidak didasarkan pada input sumber daya, audit fiskal, atau proses administratif.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Selain akuntabilitas, Sari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Glance (2006) sistem pengendalian internal mengacu pada proses dan prosedur pemerintah daerah yang ditetapkan dengan tujuan untuk pencapaian yang objektif.

Fenomena terkait kinerja instansi pemerintah telah terjadi di berbagai pemerintah daerah salah satunya di Kabupaten pasaman. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Kinerja Pemerintah Daerah Secara nasional, kinerja pemerintah daerah di Indonesia berada pada tingkat rata-rata yang cukup baik. Kasus ini dilihat dari rata-rata skor pencapaian pemerintah daerah berkisar di atas 3,00 yang berstatus sangat tinggi (ST) dengan skor maksimal 3,75. Namun dari segi peringkat, untuk Kabupaten Pasaman masih jauh dari kabupaten/kota lain di Indonesia. Kabupaten Pasaman menduduki peringkat ke-93 secara nasional dimana skor rata-rata nya hanya 3.215. Kabupaten Pasaman masih tertinggal jauh dalam beberapa hal di antaranya jumlah sarana dan prasarana yang rusak seperti jalan, gedung dan jembatan, dukungan kurang lancar bagi masyarakat kurang mampu dan jaringan telekomunikasi / yang sulit di akses di banyak daerah.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai landasan teori. Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan *principal*. Dalam teori *stewardship*, OPD sebagai *steward* akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* (OPD) dan masyarakat (*principal*) tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan keadaan dimana manajer (pemerintah daerah) sebagai *steward* lebih berfokus terhadap kepentingan bersama atau tujuan suatu organisasi, bukan hanya pada keinginan pribadi. Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006). Dalam teori *stewardship*, *steward* dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki

fungsi mengelola sumber daya, dan prinsipal adalah orang-masyarakat yang memiliki sumber daya tersebut. Karena organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk melayani publik dan akuntabel kepada publik (publik), maka teori *stewardship* dapat diterapkan pada model kasus organisasi sektor publik. (Jatmiko, 2020)

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan kepada pemerintah sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP Nomor 8, 2006) . Sedangkan menurut Nordiawan *et al.*, (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, kinerja pemerintah adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pengambilan keputusan yang diperuntukan kepada publik. Proses pertanggungjawaban ini menentukan penilaian atas keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut Mardiasmo (2002) mengemukakan akuntabilitas adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah yang mempunyai hak dan kewajiban atas pertanggungjawaban tersebut. Kinerja OPD diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap kegiatan aparatur pada semua tingkatan OPD.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal menurut COSO (1992) dan SAS 78 dalam Lestari (2013) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam bentuk : (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

### **Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam kerangka teori *stewardship* pihak steward dan principal memiliki tujuan yang selaras dengan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi, maka dari itu akuntabilitas yang merupakan kewajiban dalam memberikan suatu pertanggung jawaban sangat diperlukan dalam misi mencapai tujuan bersama tersebut. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Upaya reformasi New Public Management telah ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor publik melalui implementasi akuntabilitas yang efektif (Christensen & Laegreid, 2014). Penelitian terdahulu Thoms *et al.* (2002) menemukan bahwa akuntabilitas untuk rekan kerja dan manajemen berhubungan positif dengan kepercayaan

pada supervisor dan manajer, dengan peningkatan kepuasan kerja. Saputra & Darwanis (2014) juga menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja OPD Aceh Selatan. Disusul penelitian terbaru oleh Han & Hong (2019) menemukan bahwa akuntabilitas secara positif mempengaruhi kinerja lembaga pemerintahan. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, penulis termotivasi untuk mengajukan hipotesis berikut:

**H1:** Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Sistem Pengendalian Internal merupakan ungkapan yang biasanya diterapkan untuk menggambarkan bagaimana manajemen memastikan bahwa suatu organisasi sesuai dengan tujuan keuangan dan lainnya. Sistem pengendalian internal tidak hanya berkontribusi pada efektivitas manajemen tetapi juga merupakan salah satu tugas penting dewan direksi (Verschoor, 1999, 408). Pengendalian internal mencakup berbagai teknik dan tindakan yang dapat dipraktikkan oleh manajemen untuk menjamin kelancaran suatu subansi bisnis, serta target yang jelas sangat penting untuk proses pengendalian yang ingin dicapai antara lain ialah melaksanakan operasi yang tertib, bermoral, ekonomis, efisien dan efektif, memenuhi komitmen tanggung jawab, menyetujui undang undang dan peraturan yang sesuai dan mempertahankan asset dari kehilangan, penyalahgunaan dan bahaya (Kumar & Sharma, 2005).

Penelitian terkait sistem pengendalian internal pernah dilakukan oleh Prasetyono dan Kompyurini (2007) yang menggunakan pendekatan *balanced scorecard* menemukan hasil yaitu komitmen organisasi, pengendalian intern dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Serta penelitian yang dilakukan Yuda (2012) mendapatkan hasil yang sama yaitu terdapatnya pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi, diperkuat oleh penelitian Gultom (2010) yang menguji pengaruh komitmen organisasi, pengendalian intern dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi yang mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, penulis termotivasi untuk mengajukan hipotesis berikut:

**H2:** Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kausatif yang berarti penelitian ini merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan sistem pengendalian internal dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasaman. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang berarti teknik pengumpulan data berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pegawai yang terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan, penetapan, penyusunan anggaran keuangan dan bagian SPI, yaitu : Kepala Badan/Dinas, Bendahara, Kasubag Keuangan, dan Kasubag SPI. Penelitian ini diukur menggunakan skala likert dalam setiap pengukuran variabel nya, yaitu akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yaitu berupa daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi dari responden. Kuesioner yang telah dibuat akan diantarkan langsung ke alamat responden. Kuesioner dibagikan sebanyak empat buah kepada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman. Untuk pengembalian kuesioner peneliti

sendiri yang nantinya akan menjemputnya secara pribadi pada waktu yang telah ditentukan. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Tahap-tahap pengujian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : (1) uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, (3) analisis statistik deskriptif, (4) analisis koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), (4) Uji F, dan (5) Uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Ketentuan valid atau tidaknya dapat ditentukan dengan kriteria nilai r. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut dianggap valid.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<b>Kinerja Pemerintah Daerah (Y)</b>	Y1	0,551	0,163	Valid
	Y2	0,895	0,163	Valid
	Y3	0,925	0,163	Valid
	Y4	0,839	0,163	Valid
	Y5	0,903	0,163	Valid
	Y6	0,833	0,163	Valid

*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengujian validitas kinerja pemerintah daerah dari 144 responden, semua pernyataan dari 6 pernyataan menunjukkan besarnya nilai r hitung seluruh butir pertanyaan nilainya lebih besar dari r tabel 0,163. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir dinyatakan valid dan kuesioner dalam penelitian ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu regresi linear berganda.

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Akuntabilitas (X1)**

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<b>Akuntabilitas (X1)</b>	X1.1	0,725	0,163	Valid
	X1.2	0,822	0,163	Valid
	X1.3	0,853	0,163	Valid
	X1.4	0,802	0,163	Valid
	X1.5	0,713	0,163	Valid
	X1.6	0,806	0,163	Valid
	X1.7	0,739	0,163	Valid
	X1.8	0,852	0,163	Valid

*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengujian validitas akuntabilitas dari 144 responden, semua pernyataan dari 8 pernyataan dikatakan valid seluruhnya karena r hitung dari setiap masing-masing pertanyaan lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan analisis selanjutnya.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)**

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
<b>Sistem Pengendalian Internal X2)</b>	X2.1	0,587	0,163	Valid
	X2.2	0,757	0,163	Valid
	X2.3	0,675	0,163	Valid
	X2.4	0,590	0,163	Valid
	X2.5	0,610	0,163	Valid
	X2.6	0,777	0,163	Valid
	X2.7	0,737	0,163	Valid
	X2.8	0,829	0,163	Valid
	X2.9	0,736	0,163	Valid
	X2.10	0,778	0,163	Valid
	X2.11	0,691	0,163	Valid
	X2.12	0,578	0,163	Valid
	X2.13	0,414	0,163	Valid
	X2.14	0,435	0,163	Valid

*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengujian validitas sistem pengendalian internal dari 144 responden, semua pernyataan dari 14 pernyataan dikatakan valid seluruhnya karena r hitung dari setiap masing-masing pertanyaan lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan analisis selanjutnya.

### **Pengujian Reliabilitas**

Untuk melihat reliabilitas masing-masing variabel agar konsisten jika digunakan dalam waktu dan alat ukur yang berbeda, digunakan koefisien cronbach's alpha, yaitu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,6. Dari penelitian yang dilakukan pada 144 responden, diketahui bahwa *cronbach's alpha* masing-masing variable lebih besar dari 0,6. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Penilaian
Akuntabilitas (X1)	0,918	Reliabel
Ssitem Pengendalian Internal (X2)	0,890	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,906	Reliabel

*Sumber : Data primer yang diolah tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *cronbach's Alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60. Instrumen akuntabilitas memiliki *cronbach's Alpha* 0,918, instrumen sistem pengendalian internal memiliki *cronbach's Alpha* 0,890, dan instrument kinerja pemerintah daerah memiliki *cronbach's Alpha* 0,906. Sehingga setiap variabel dikatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi pengujian normalitas data dalam penelitian ini. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, yang mana jika nilai sig. > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal dan sebaliknya jika nilai sig. < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,76828252
Most Extreme Differences	Absolute	0,115
	Positive	0,101
	Negative	-0,115
Test Statistic		0,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,28 <sup>c</sup>

*a. Test distribution is Normal.*

*b. Calculated from data.*

*c. Lilliefors Significance Correction.*

*Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2023*

Dengan pengolahan data SPSS didapat bahwa nilai seluruh variabel dari kolmogorov smirnov Z sebesar 0,115 dengan signifikan 0,28. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikansi dari jumlah normalitas > 0,05.

#### Uji Multikolinearitas

Syarat berlakunya model regresi berganda adalah antar variabel bebas tidak memiliki hubungan sempurna atau mengandung multikolinearitas. Uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya linier yang sempurna atau pasti diantaranya beberapa atau semua variabel

yang menjelaskan model regresi. Apabila *tolerance value*  $\geq 0,10$  dan  $VIF \leq 10$  maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VI F
1 (Constant)		
TotalX1	.898	1.113
TotalX2	.898	1.113

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, pada tabel diatas dapat dilihat variabel akuntabilitas (X1) dengan nilai VIF 1.113 dan tolerance 0,898 dan sistem pengendalian internal (X2) dengan nilai VIF 1.113 dan tolerance 0,898 dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya atau variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas karena nilai VIF seluruh variabel  $\leq 10$  dan nilai tolerance  $\geq 0,10$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejzer. Dalam uji ini apabila hasil sig  $> \alpha = 0,05$  atau 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastsitas**

Model	Unstandardized		Standardized		Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	6.229	1.416		4.401	.000
TotalX1	-.043	.029	-.129	-1.497	.137
TotalX2	-.039	.023	-.149	-1.718	.088

*Sumber : data yang diolah tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig  $> \alpha 0,05$ . Nilai signifikasi untuk variabel akuntabilitas (X1)  $0,137 > 0,05$  dan nilai signifikasi untuk variabel sistem pengendalian internal (X2)  $0,088 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.



## Statistik Deskriptif

**Tabel 8**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minumum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
Akuntabilitas	144	25,00	40,00	33,31	3,99
Sistem Pengendalian Internal	144	56,00	70,00	61,15	5,14
Kinerja Pemerintah Daerah	144	18,00	30,00	26,52	2,91

*Sumber : data primer yang diolah tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat hasil *descriptive statistics* dari hasil menghitung tingkat capaian responden dengan menggunakan rumus. Pada akuntabilitas (X1) mendapatkan nilai terendah (minimum) sebesar 25,00, lalu nilai terbesar (maksimum) sebesar 40,00, dan mendapatkan jumlah rata-rata sebesar 33,31 lalu mendapatkan standar deviasi atau nilai akar kuadrat dari suatu varians sebesar 3,99. Selanjutnya variabel sistem pengendalian internal (X2) mendapatkan nilai terendah (minimum) sebesar 56,00, lalu nilai terbesar (maksimum) sebesar 70,00, dan mendapatkan jumlah rata-rata sebesar 61,15, lalu mendapatkan standar deviasi sebesar 5,14. Variabel kinerja pemerintah daerah (Y) mendapatkan nilai terendah (minimum) sebesar 18,00 selanjutnya nilai terbesar (maksimum) sebesar 30,00, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 26,51 dan standar deviasi nya sebesar 2,91.

## Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 25. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 25 terdapat pada Tabel 4.17 sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant )	31.439	2.826		11.127	.000
	TotalX1	.142	.064	.187	2.213	.029
	TotalX2	-.156	.043	-.308	-3.637	.000

*Sumber : data primer diolah pada tahun 2023*

Dari Tabel 4.17 dari persamaan regresi, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 31.439 + 0,142 X_1 - 0,156 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui diantaranya: Konstan = 31.439 ( positif ), artinya bila akuntabilitas ( X1 ) dan sitem pengendalian internal ( X2 ) bernilai 0 maka kinerja pemerintah daerah sebesar = 31.439. Koofisien b1 = 0, 142 ( positif ), artinya akuntabilitas meningkat 1% maka akan diikuti peningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar =0,142. Koofisien b2 = 0,156 ( negatif ), artinya bila sistem pengendalian internal meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan kinerja pemerintah daerah = 0,156

### Uji Pengaruh Simultan ( Uji F )

Uji F ( simultan ) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, apabila F hitung > F tabel maka berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika F hitung < F tabel maka berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

**Tabel 10**  
**Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	90.165	2	45.083	7.230	.001 <sup>b</sup>
Residual	879.161	141	6.235		
Total	969.326	143			

a. Dependent Variable: total

b. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1

Sumber : data primer yang diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai F Hitung yaitu 7,230 dan nilai signifikasi 0,001. Nilai F tabel untuk 144 responden adalah 3,06 maka dapat disimpulkan bahwa F Hitung > F Tabel yaitu 7,230 > 3,06 dengan nilai signifikasi 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

### Koofisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

*Adjusted R Square* digunakan untuk mengetahui berapa pengaruh variabel independen ke variabel dependen secara keseluruhan atau secara bersama-sama. Nilai *Adjusted R Square* dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koofisien Determinasi Model Summaryb**

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.312 <sup>a</sup> .097	.085	2.788

a. Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1

b. Dependent Variable: total

Sumber : data primer yang diolah tahun 2023

Dari tabel output SPSS model summary diatas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,085. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah adalah 8,5%, sedangkan 81,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t tabel adalah  $= 0,05/2 : n - k - 1 = 0,05/2 : 144 - 2 - 1 = 0,025 : 141$  kemudian dicari pada distribusi nilai t table maka ditemukan nilai t table sebesar 1,997.

Tabel 412

Hasil Pengujian Hipotesis			
Hitung	t hitung	Sig	Hasil
H1	3.181	.002	Diterima
H2	3.145	.002	Diterima

Sumber : data primer yang diolah tahun 2023

### Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{sig} < 0,05$  begitupun sebaliknya, hipotesis ditolak jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{sig} > 0,05$ . Nilai t tabel = 0,05 adalah 1,997. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3.181 dan nilai sig adalah 0,002. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  yaitu  $3.181 > 1,991$  atau nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel akuntabilitas ( X1 ) bernilai positif yaitu 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis pertama (H1) **diterima**.

### Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{sig} < 0,05$  begitupun sebaliknya, hipotesis ditolak jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau nilai  $\text{sig} > 0,05$ . Nilai t tabel = 0,05 adalah 1,997. Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3.145 dan nilai sig adalah 0,002. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  yaitu  $3.145 > 1,997$  atau nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel sistem pengendalian internal (X2) bernilai positif 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis kedua (H2) **diterima**.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman. Implementasi hasil uji antara akuntabilitas dan teori *stewardship* memberi makna bahwa pemerintah sebagai agen (pimpinan) dan rakyat sebagai prinsipal (yang dilayani) tentu harus mempertanggungjawabkan kepada OPD meliputi rencana kinerja; pengukuran kinerja; evaluasi kinerja; dan analisis akuntabilitas kinerja, dengan menggunakan persamaan regresi berganda yang telah dirangkum pada table 9 menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan untuk variabel akuntabilitas menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 yang artinya bahwa H1 diterima atau adanya pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah dan koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu 0,195.

Hubungan antara akuntabilitas dan kinerja dapat dijelaskan oleh teori *stewardship* dimana *steward* dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki fungsi mengelola sumber daya, dan prinsipal adalah orang-masyarakat yang memiliki sumber daya tersebut. Antara pemerintah (*stewards*) dan masyarakat (*principals*) ada kesepakatan yang ada sepenuhnya pada kepercayaan, sesuai dengan tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garnita (2008), Garini (2011) dan Ismiarti (2013), Saputra & Darwanis (2014) Novatiani *et al.*, (2019) Tran *et al.*, (2021), yang mana penelitian menunjukkan hasil yaitu akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Juga penelitian yang dilakukan oleh Han & Hong (2019) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja organisasi dengan otonomi daerah sebagai variabel moderasi, menemukan bahwa akuntabilitas secara positif berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam OPD Pemerintah, maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil uji-t untuk sistem pengendalian internal diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi untuk variabel sistem sistem pengendalian internal menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi 0,05 yang artinya bahwa sistem sistem pengendalian internal diterima atau adanya pengaruh positif sistem sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif 0,150.

Hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kinerja dapat dijelaskan melalui teori *stewardship*, teori ini menjelaskan keadaan dimana manajer (pemerintah daerah) sebagai *steward* lebih berfokus terhadap kepentingan bersama atau tujuan suatu organisasi, bukan hanya pada keinginan pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono dan Kompyurini (2007), Yuda (2012, Noviyana & Pratolo (2018) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah OPD.. Selanjutnya penelitian oleh yang dilakukan Mattoasi *et al.*, (2021) yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja. Disusul penelitian yang dilakukan Putri dan Halmamawati (2022) yang meneliti tentang Pengaruh sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan

terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Pasaman. Artinya dengan adanya keterlibatan pimpinan dan bawahan OPD dalam ke akuntabilisan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD di Kabupaten Pasaman. Dimana Sistem pengendalian internal dapat bermanfaat jika saja hasil Sistem pengendalian internal tersebut yang dapat memberikan umpan balik bagi anggota organisasi dalam usaha perbaikan aturan internal.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: Dalam penelitian ini hanya menggunakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman sebagai objek penelitian. Oleh sebab itu hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk kota atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, kemungkinan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban responden yang tidak bias dikontrol secara langsung sehingga memungkinkan adanya jawaban responden yang tidak cermat serta pertanyaan yang mungkin tidak dipahami responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman diharapkan lebih mengembangkan lagi akuntabilitas dalam organisasinya.
2. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman diharapkan lebih memahami prinsip pertanggungjawaban atas pelaksanaan organisasi kepada publik. Tuntutan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar juga diperhatikan lagi, karena sejatinya masyarakat adalah pemberi amanah dalam kegiatan pemerintahan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah variabel yang lain yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah dan menambah jumlah responden nya menjadi lebih banyak atau memperluas lagi objek penelitiannya agar bisa digeneralisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M. Z., & Mh, S. *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*. 6. [Http://Researchgate.Net/](http://Researchgate.Net/).
- Azlina, N., & Desmiyawati. (2012). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi* (Survey Pada Rumah sakit di Propinsi Riau). *Pekbis Jurnal*, Vol.4, No.2, 124-130.

- Christensen, T., & Lægveid, P. (2014). Performance and accountability—A theoretical discussion and an empirical assessment. *Publik Organiz.* Clarke, T. d. (2014). The SAGE Handbook of Corporate Governance.
- Cooper, R. D., & Emory, W. C. (1996). *Metode Penelitian Bisnis: Vol. Jilid 1* (5 Ed.). Erlangga.
- Cribb, Jo. (2006). *Agents or Stewards? Contracting with Voluntary Organisations. Policy Quarterly* Vol.2
- Glance, A. (2006). Effectiveness Of Internal Control.Local Government: ResultsOf The 2006. 19-26.
- Gultom, Ady Raphon. (2012). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.*
- Han, Y., & Hong, S. (2019). The Impact of Accountability on Organizational Performance in the U.S. Federal Government: The Moderating Role of Autonomy. *Review of Publik Personnel Administration*, 39(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682816>
- Hara, M. *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Akuntabilitas Dan Kepuasan Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Kota Surakarta.* 18.
- Hood, C. (1995). The “New Publik Management” In The 1980s: Variations On A Theme. *Accounting, Organizations And Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 1-4.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional.
- Mahmudi. (2016). *Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3th Ed).* Yogyakarta. Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Muktiadji, N., Mulyani, S., Djanegara, M. S., & Pamungkas, B. (2020). *The Role of Financial Management Accountability in Enhancing Organizational Performance in Indonesia.* 7(12), 8.
- Nasir, A., & Ranti, O. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Skripsi, Universitas Riau.
- Nordiawan, Deddi, & Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua.* Jakarta: Salemba Empat.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/Jimb.V10i1.15983>
- Noviyana, R. A., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

- Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/rab.020227>
- Permana, I. A. (2015). *Pengaruh Partisipasi Pu*
- Sugiyono. (2013 ). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ter Bogt, H. J., Van Helden, G. J., & Van Der Kolk, B. (2015). Challenging The New Publik Management Ideas About Performance Management: Selectivity And Differentiation In Outcome-Oriented Performance Budgeting: Challenging New Publik Management Ideas About Performance Managem**bl**ik *Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Pesisir Selatan)*.
- Rahakbuw, P. J., & Firdausy, S. (2018, September 17). *Akuntabilitas MenujuIndonesia Yang Berkinerja*.
- Sari, E. N. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada Perbankan Di Kota Gorontalo).
- Shokoohi, M., & Saeidi, P. (2015). *Investigating The Relation Between Internal Control System And Financial Performance Of Telecommunication Company Of Golestan Province*. 3, 6.
- ent. *Financial Accountability & Management*, 31(3), 287–315. <https://doi.org/10.1111/Faam.12058>
- Thoms, P., Dose, J.J., Scott, K.S.,. (2002). *Relationships between accountability, job satisfaction, and trust*. *Hum. Resour. Develop. Quart.*13 (3), 307–323.
- Tran Thi, B. (2014). The Cycle of Transparency, Accountability, Corruption, and Administrative Performance: Evidence from Vietnam. *Journal of Economics and Development*, 32–48. <https://doi.org/10.33301/2014.16.03.02>
- Tran, Y. T., Nguyens, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role Of Accountability In Determining The Relationship Between Financial Reporting Quality And The Performance Of Publik Organizations: Evidence From Vietnam. *Journal Of Accounting And Publik Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/J.Jaccpubpol.2020.106801>
- Umar, H. (2002). *Teknik Evaluasi Bisnis Dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif Dan Modern*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
- Verbeeten, F. H. M., & Speklé, R. F. (2015). Management Control, Results- Oriented Culture and Publik Sector Performance: Empirical Evidence on New Publik Management. *Organization Studies*, 36(7), 953–978. <https://doi.org/10.1177/0170840615580014>
- Verschoor, C.C. (1999). *Corporate Performance Is Closely Linked to a Strong Ethical Commitment*, *Business and Society Review*, 104(4), 407-415.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publlik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuda, Prima. (2012). *Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)*. Skripsi, Universitas Siliwangi. Tasikmalaya